



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12993-13007

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan Orientasi Politik Mahasiswa FKIP Universitas Riau

Nevza Khodijah^{1✉}, Sri Erlinda², Mirza Hardian³

Universitas Riau

Email: nevza.khodijah2769@student.unri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan orientasi politik mahasiswa yang membutuhkan bekal berupa pendidikan politik yang mana didapatkan melalui materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun faktor pembentuk dari orientasi politik yaitu pengetahuan poliitk yang harus dimiliki seseorang, pola pikir dan didikan di lingkungan sekitar yang juga turut memengaruhi bagaimana hasil akhir atau pandangan akhir politik seseorang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, melalui sumber data primer yang didapatkan dengan menyebarkan angket/kuisisioner melalui *Google Form* kepada 262 responden. Dari hasil uji korelasi Rank Spearman dengan nilai P value atau Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 atau < (kurang dari) 0,05 atau 0,01 dan nilai Correlation Coefficient sebesar 0,612 membuktikan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga terdapat hubungan antar variabel bebas (x) yaitu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan terhadap variabel terikat (y) yaitu Orientasi Politik Mahasiswa FKIP Universitas Riau.

Kata Kunci: *Pendidikan Kewarganegaraan, Orientasi Politik, Pendidikan Politik*

Abstract

This research is motivated by the issue of students' political orientation which requires provision in the form of political education obtained through Citizenship Education course material. The factors that form political orientation are the political knowledge that a person must have, the mindset and upbringing in the surrounding environment which also influence the final result or final view of a person's politics. This research uses a quantitative approach, through primary data sources obtained by distributing questionnaires via Google Form to 262 respondents. From the results of the Spearman Rank correlation test with the P value or Sig. (2-tailed) of 0.000 or < (less than) 0.05 or 0.01 and a Correlation Coefficient value of 0.612 proves that H_0 is rejected and H_a is accepted, so that there is a relationship between the independent variable (x), namely Citizenship Education Subjects and the variable attachment (y) namely the Political Orientation of Riau University FKIP Students.

Keywords: *Citizenship Education, Political Orientation, Politik Education*

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan secara umum dicitrakan sebagai bentuk dalam mendidik nilai, karakter, hukum, bahkan pola pikir politik setiap individu. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan di berbagai tingkat pendidikan, dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Secara konsep Pendidikan Kewarganegaraan sebagai muatan tentang pembinaan kebangsaan dan secara komprehensif berfungsi dalam mencapai perwujudan inti dari tujuan pendidikan nasional dalam mewujudkan warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab (Ubaedillah & Rozak, 2012: 15). Sebagai tindak lanjut dari tujuan pendidikan nasional, keberadaan konsep muatan didalam Pendidikan Kewarganegaraan turut pula menjadi jawaban serta solusi atas ketidaktercapaiannya muatan dalam implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di lapangan atau dunia pendidikan (Winataputra, Udin Saripudin, 2012: 33).

Ketidaktercapaian muatan dalam implementasi Pendidikan Kewarganegaraan salah satunya merujuk pada pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi. Palsanya konsep perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab pada Pendidikan Kewarganegaraan mengandung kompetensi warganegara yang urgensinya cukup terlihat pada pelaksanaan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Terciptanya masyarakat yang demokratis menjadi sumber pengetahuan dasar dalam membentuk perilaku politik yang akan menjadi awal dalam pembentukan budaya politik masyarakat. Dibutuhkan adanya orientasi politik guna terciptanya perilaku

politik dan menjadi aspek yang digunakan dalam interaksi politik, keduanya diwujudkan dalam bentuk masyarakat yang demokratis (Syahrul et al., 2020: 517).

Ubaedillah dan Rozak (2012), menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak akan lepas dari pokok pembahasan yang harus dimiliki oleh seorang warganegara berupa pengetahuan, kecakapan atau keterampilan, nilai dan juga komitmen (Ubaedillah & Rozak, 2012: 5). Sesuai dengan kompetensi dasar dari Pendidikan Kewarganegaraan yang terdiri dari tiga jenis, yakni kompetensi mengenai pengetahuan dari kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang mengacu pada kemampuan secara praktikal terkait inti dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, seperti masyarakat yang demokrasi. Selanjutnya kompetensi sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang terkait dengan kesadaran dan komitmen dari warganegara. Serta kompetensi kemampuan ataupun keterampilan yang harus dimiliki warganegara (*civic skill*) seperti dalam mewujudkan partisipasi terhadap kepentingan yang berkaitan dengan negara (Ubaedillah & Rozak, 2012: 17).

Bentuk luaran dari perwujudan masyarakat yang demokratis membutuhkan adanya partisipasi politik yang dilakukan masyarakat. Dalam menentukan hasil akhir berupa keputusan politik, tentu terdapat pola dan sistem berpikir tertentu atau arah yang dipercayai dan diikuti oleh warganegara sehingga individu dapat menentukan kearah mana pilihan dari keputusan politiknya. Salah satu bentuk perwujudan dari keputusan politik ini yang sering dijumpai berupa pelaksanaan pemilihan umum oleh warganegara. Dilansir dari hasil survei organisasi partisipasi pemilu, Jeune & Raccord (J&R) dengan survei yang dilakukan pada 10-16 Maret 2019 bahwa potensi golput atau tidak memilih pada kalangan muda pada pemilu Presiden 2019 mencapai lebih dari 40%. Survei dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh Provinsi di Indonesia ini juga menghasilkan data berupa tingkat ketidakpedulian generasi milenial dan Z pada politik dengan persentase 65,4% dan minimnya informasi terkait yang didapatkan dengan persentase 25,3%. Dimana keduanya merupakan alasan terbesar sebagai faktor pendorong tingginya angka golput pada generasi milenial dan Z. (Madrim, S. „Potensi Golput Generasi Muda Capai 40 Persen“. Voaindonesia.com, 04 April 2019 melalui <https://www.voaindonesia.com/a/potensi-golput-milenial-capai-40-persen/486708.html>. Diakses pada 10 September 2022).

Penulis juga melaksanakan *pra-survey* terhadap 33 orang mahasiswa FKIP Universitas Riau dengan menggunakan angket yang disebarakan melalui *Googleform*. Dari 33 mahasiswa yang mengisi angket tersebut, didapatkan hasil atau kesimpulan bahwa 78,1% - 90,6% atau 25-30 orang mahasiswa FKIP setelah mengikuti mata kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan memiliki pengetahuan mengenai politik serta memahami dan sadar akan hak serta kewajiban mereka sebagai warganegara. Yang mana hal ini menjadi dasar bagi mereka dalam memilih dan melihat bagaimana kebijakan pemerintah yang baik sebagai luaran dari pelaksanaan politik.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Jeune & Raccord (J&R) dan hasil *pra-survey* di atas, pendidikan politik yang didapatkan dari materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan menjadi kompetensi dan juga pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh milenial (Rinderman et.al., 2011: 2). Hal ini yang juga berkaitan dengan proses dalam pengambilan keputusan politik oleh individu. Keputusan politik tidak hanya berbentuk sebagai pilihan secara fisik seperti dalam pemilu, namun juga berbentuk partisipasi, kesadaran, perilaku, serta bagaimana bentuk respon dari warganegara terhadap politik itu sendiri (Agus et.al., 2020: 113). Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Gabriel Almond dan Verba (1990) bahwa ada tiga pembagian dari orientasi setiap individu terhadap politik dan sistemnya (Kiftiah et.al., 2014: 602).

Orientasi ini dibagi menjadi orientasi kognitif yang berkaitan dengan adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki individu, kewajiban, luaran dan juga peranan setiap individu atau warganegara pada politik yang juga mengacu pada pemahaman individu terhadap politik yang didasarkan oleh ilmu pengetahuan yang dimiliki, serta bagaimana kesadaran politik yang memengaruhi luaran secara praktis yang dilakukan. Selanjutnya orientasi afektif yang berkaitan dengan sikap, respon berupa penolakan maupun penerimaan, keterlibatan ataupun yang berkaitan dengan partisipasi politik, yang nantinya tentu akan memengaruhi bagaimana perasaan atau pandangan pribadi individu terhadap politik. Setelah melalui proses pemahaman dan terbentuknya sikap berupa respon terhadap politik, hal ini akan menghasilkan keputusan akhir dari setiap individu terhadap politik yang disebut orientasi evaluatif, yang berisi penilaian dan pendapat mengenai objek politik dari keseluruhan atau kedua orientasi lainnya (Dadut et.al., 2021: 72).

Untuk mencapai keputusan akhir terhadap politik, tidak serta merta didapatkan oleh individu. Terdapat suatu pola pikir politik yang memerlukan adanya kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dimiliki seseorang yang terkait dengan pelaksanaan dan atau perilaku demokratis juga politik (Rinderman et.al., 2011: 2). Substansi dari Pendidikan Kewarganegaraan memberikan urgensi tersendiri sebagai salah satu faktor penentu dalam mendapatkan pendidikan politik, serupa dengan penelitian oleh Fajrin, dkk (2022) bahwa pelaksanaan demokrasi dan juga pendidikan politik memiliki hubungan yang kebenarannya terbukti. Hal ini dikarenakan pendidikan itu menjadi kondisi dan urgensi dalam demokrasi

untuk dapat memberikan konsep-konsepnya. Adanya pola pikir dan didikan yang diterima setiap individu di setiap lingkungan juga berperan dalam menentukan keputusan akhir yang berbeda terkait politik karena pengaruhnya, hal ini dikarenakan pandangan yang disampaikan kembali oleh orangtua kepada anak akan memengaruhi bagaimana preferensi awal politik anak yang didapatkan di lingkungan awal anak yaitu keluarga (Hardian, 2021: 48).

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa faktor pembentuk dari pandangan dan keputusan akhir mengenai politik dari individu berorientasi pada ilmu pengetahuan mengenai pendidikan politik yang berasal dari Pendidikan Kewarganegaraan (Rinderman et.al., 2011: 3). Sederhananya pendidikan politik menjadi salah satu substansi yang dapat ditemukan dan dibahas dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai fasilitas dalam perwujudan masyarakat yang demokratis memiliki luaran yang berbentuk partisipasi politik aktif dari masyarakat (Winataputra, Udin Saripudin, 2012: 16). Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hubungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan orientasi politik mahasiswa FKIP Universitas Riau.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Dengan tempat penelitian di FKIP Universitas Riau pada rentang waktu penelitian yaitu Juli - Agustus 2023. Adapun populasi penelitian yaitu seluruh mahasiswa aktif FKIP Universitas Riau yang berjumlah 6.683 mahasiswa dan penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan rujukan dari teori Issac & Michael, yang dipaparkan melalui tabel persebaran ukuran sampel Issac & Michael dengan signifikansi 10% untuk jumlah populasi sebesar 6.683 (penulis membulatkan populasi menjadi 7000); dan dengan menggunakan rumus penentuan jumlah sampel menurut Issac & Michael, dengan jumlah sampel sebesar 262 responden (Sugiyono, 2019: 71).

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada skala likert menggunakan alternatif Jawaban skala Likert untuk mengukur sikap, pandangan atau pendapat, serta persepsi seseorang ataupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial yang dalam hal ini adalah variabel penelitian (Sugiyono, 2017: 134). Dalam mengolah data penulis menentukan hubungan antar kedua variabel penelitian dengan menggunakan analisis korelasi rank spearman Setelah didapatkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis korelasi *rank spearman*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memiliki enam belas (16) indikator pada variabel Pendidikan Kewarganegaraan (x), yaitu Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan; Esensi Identitas Nasional; Urgensi Identitas Nasional; Urgensi Integrasi Nasional; Nilai Yang Sesuai Dengan Konstitusional UUD 1945; Norma Yang Sesuai Dengan Konstitusional UUD 1945; Kewajiban Warganegara; Hak Warganegara; Hakikat Demokrasi Indonesia; Instrumentasi Demokrasi Indonesia; Praksis Demokrasi Indonesia; Historis Konstitusional; Urgensi Wawasan Nusantara; Urgensi Ketahanan Nasional; Urgensi Bela Negara; dan Permasalahan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Total pernyataan pada variabel Pendidikan Kewarganegaraan sebanyak 16 pernyataan yang masing-masing terdapat pada 16 indikator di atas.

Sedangkan pada variabel Orientasi Politik, terdapat tujuh (7) indikator pada variabel ini, yaitu Pandangan Mahasiswa Terhadap Kebijakan Politik Pemerintah; Respon Terhadap Isu Politik Yang Ada; Memiliki Ilmu Pengetahuan Mengenai Politik; Sadar Akan Kewajiban Sebagai Warganegara; Partisipasi Politik; Sikap Terhadap Kebijakan Politik; Komitmen Sikap Terhadap Kebijakan Politik Pemerintah. Total pernyataan pada variabel ini sebanyak 7 pernyataan yang masing-masing terdapat pada 7 indikator di atas.

Adapun responden pada penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa aktif FKIP Universitas Riau yang telah mengambil dan mempelajari Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan jumlah sampel sebanyak 262 responden. Berdasarkan hasil penelitian variabel x yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, maka hasil analisis dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Variabel Mata Kuliah Pkn

No.	Indikator	Alternatif Jawaban							
		SS		S		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan	143	55%	114	43%	5	2%	0	0%
2.	Esensi Identitas Nasional	112	43%	136	52%	14	5%	0	0%
3.	Urgensi Identitas Nasional	121	46%	131	50%	10	4%	0	0%
4.	Urgensi Integrasi Nasional	115	44%	131	50%	16	6%	0	0%
5.	Nilai Yang Sesuai Dengan Konstitusional UUD 1945	150	57%	105	40%	7	3%	0	0%

	Norma Yang Sesuai								
6.	Dengan Konstitusional UUD 1945	171	65%	88	34%	3	1%	0	0%
7.	Kewajiban Warganegara	124	47%	129	50%	9	3%	0	0%
8.	Hak Warganegara	146	55%	109	42 %	7	3%	0	0%
9.	Hakikat Demokrasi Indonesia	67	26%	178	68%	17	6%	0	0%
10.	Instrumentasi Demokrasi Indonesia	67	26%	163	62%	32	12%	0	0%
11.	Praksis Demokrasi Indonesia	56	22%	174	66%	32	12%	0	0%
12.	Historis Konstitusional	50	19%	171	65%	41	16%	0	0%
13.	Urgensi Wawasan Nusantara	109	42%	145	55%	8	3%	0	0%
14.	Urgensi Ketahanan Nasional	102	39%	153	58%	7	3%	0	0%
15.	Urgensi Bela Negara	116	44%	135	52%	11	4%	0	0%
16.	Permasalahan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	139	53%	113	43%	10	4%	0	0%
	Jumlah	1788	683%	2175	830%	229	87%	0	0%
	Rata-rata	112	43%	136	52%	14	5%	0	0%

Sumber: Data Olahan 2023

Berdasarkan data rekapitulasi dari tabel di atas untuk variabel Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan 16 indikator pada variabel ini, didapatkan nilai dominan bahwa rata-rata sebesar 52% atau sebanyak 136 responden setuju bahwa setelah mempelajari Mata Kuliah PKn mereka mengetahui hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. esensi identitas Nasional, urgensi identitas Nasional, urgensi integrasi Nasional, nilai yang sesuai dengan konstitusional UUD 1945, norma yang sesuai dengan konstitusional UUD 1945, kewajiban warganegara, hak warganegara, hakikat demokrasi Indonesia, instrumentasi demokrasi Indonesia, praksis demokrasi Indonesia, historis konstitusional, urgensi wawasan nusantara, urgensi ketahanan Nasional; urgensi bela negara, dan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu data rekapitulasi menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 43% atau sebanyak 112 responden menjawab 'Sangat Setuju', 5% atau sebanyak 14 responden menjawab 'Tidak

Setuju', dan 0% atau tidak ada responden yang menjawab 'sangat tidak setuju'. Dari data rekapitulasi di atas juga dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban dengan persentase tertinggi sebesar 68% atau sebanyak 178 responden yang menjawab 'Setuju' ada pada indikator Hakikat Demokrasi Indonesia (indikator 9). Sedangkan alternatif jawaban dengan persentase terendah sebesar 0% atau 0 responden yang menjawab 'Sangat Tidak Setuju' pada seluruh indikator.

Pada variabel x yaitu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berada pada tingkatan "sangat baik". Hal ini dikarenakan pada variabel Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan persentase rata-rata responden yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebesar 43% , menjawab Setuju (S) sebesar 52%, menjawab Tidak Setuju (TS) sebesar 5%, dan menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) sebesar 0%. Adapun penjumlahan untuk persentase jawaban Sangat Setuju dan Setuju yaitu sebesar 95% yang berada pada rentang 75,01% - 100% dan dapat disimpulkan termasuk kedalam kategori "sangat baik".

Berdasarkan hasil penelitian variabel y yaitu orientasi politik mahasiswa FKIP Universitas Riau, maka hasil analisis dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Jawaban Variabel Orientasi Politik Mahasiswa FKIP UR

NO.	Indikator	Alternatif Jawaban							
		SS		S		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Pandangan Mahasiswa Terhadap Kebijakan Politik Pemerintah	68	26%	180	69%	14	5%	0	0%
2.	Respon Terhadap Isu Politik Yang Ada	72	27%	165	63%	25	10%	0	0%
3.	Memiliki Ilmu Pengetahuan Mengenai Politik	72	27%	172	66%	18	7%	0	0%
4.	Sadar Akan Kewajiban Sebagai Warganegara	84	32%	164	63%	14	5%	0	0%
5.	Partisipasi Politik	70	27%	174	66%	18	7%	0	0%
6.	Sikap Terhadap Kebijakan Politik	47	18%	193	74%	22	8%	0	0%
7.	Komitmen Sikap Terhadap Kebijakan Politik Pemerintah	57	22%	177	67%	28	11%	0	0%
	Jumlah	470	179%	1225	468%	139	53%	0	0%
	Rata-rata	67	26%	175	67%	20	8%	0	0%

Sumber: Data Olahan 2023

Berdasarkan data rekapitulasi dari tabel di atas untuk variabel Orientasi Politik Mahasiswa FKIP Universitas Riau dengan 7 indikator pada variabel ini, didapatkan nilai dominan bahwa rata-rata sebesar 67% atau sebanyak 175 responden setuju bahwa setelah mempelajari Mata Kuliah PKn mereka dapat memberikan pandangan sebagai mahasiswa terhadap kebijakan politik pemerintah, memberikan respon terhadap isu politik yang ada, memiliki ilmu pengetahuan mengenai politik, melakukan partisipasi politik secara aktif, memberikan sikap dan komitmennya terhadap kebijakan politik pemerintah. Dari data rekapitulasi di atas juga dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban dengan persentase tertinggi sebesar 74% atau sebanyak 193 responden yang menjawab "Setuju" ada pada indikator Sikap Terhadap Kebijakan Politik Pemerintah (indikator 6). Sedangkan alternatif jawaban dengan persentase terendah sebesar 0% atau 0 responden yang menjawab "Sangat Tidak Setuju" pada seluruh indikator.

Dan pada variabel *y* yaitu Orientasi Politik Mahasiswa FKIP Universitas Riau berada pada tingkatan „sangat baik“. Hal ini dikarenakan pada variabel Orientasi Politik Mahasiswa FKIP Universitas Riau dengan persentase rata-rata responden yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebesar 26%, menjawab Setuju (S) sebesar 67%, menjawab Tidak Setuju (TS) sebesar 8%, Sangat Tidak Setuju (STS) sebesar 0%. Adapun penjumlahan untuk persentase jawaban Sangat Setuju dan Setuju yaitu sebesar 93% yang berada pada rentang 75,01% - 100% dan dapat disimpulkan termasuk kedalam kategori "sangat baik".

Selanjutnya dilakukan uji statistik untuk melihat hubungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan orientasi politik mahasiswa FKIP Universitas Riau dengan menggunakan uji korelasi *Rank Spearman* yang dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Uji Korelasi *Rank Spearman*

			mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan	orientasi politik mahasiswa FKIP UR
Spearman's rho	mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan	Correlation Coefficient	1.000	.612**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	262	262
		Correlation Coefficient	.612**	1.000
	orientasi politik mahasiswa FKIP UR	Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	262	262

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Olahan 2023

Berdasarkan hasil pengujian dan pembuktian hipotesis penelitian dengan menggunakan *IBM SPSS 25* dan menggunakan uji korelasi *Rank Spearman* diketahui nilai *Correlation Coefficient* sebesar 0,612** dan nilai *P value* atau *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000. Karena hasil dari *P value* atau *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 atau < (kurang dari) 0,05 atau 0,01, maka antar variabel Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (x) terhadap Orientasi Politik Mahasiswa FKIP Universitas Riau (y) memiliki hubungan yang signifikan atau berarti. Dan nilai *Correlation Coefficient* sebesar 0,612 bermakna bahwa antar variabel memiliki hubungan yang kuat dan positif (jika nilai pada variabel x naik, maka nilai dari variabel y pun juga akan ikut meningkat).

Dari hasil uji korelasi *Rank Spearman* dengan nilai *P value* atau *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 atau < (kurang dari) 0,05 atau 0,01 dan nilai *Correlation Coefficient* sebesar 0,612** membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga terdapat hubungan antar variabel bebas (x) yaitu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan terhadap variabel terikat (y) yaitu Orientasi Politik Mahasiswa FKIP Universitas Riau.

Berdasarkan hasil uji korelasi *Rank Spearman* di atas, membuktikan bahwa adanya hubungan kuat dan berarah positif dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan orientasi politik mahasiswa FKIP Universitas Riau yang dapat dilihat dari substansi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84/E/KPT/2020 dan RPS MKWU Universitas Riau. Dari substansi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dipelajari oleh mahasiswa FKIP Universitas Riau dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik atau menghubungkan materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan kondisi, kasus, masalah atau fakta dilapangan yang ditemukan oleh mahasiswa dilingkungannya. Pendekatan ini yang turut membantu mahasiswa FKIP Universitas Riau dalam memahami substansi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga pemahaman untuk materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan lebih mudah dicapai oleh mahasiswa FKIP Universitas Riau dan hal ini akan berdampak pula terhadap meningkatnya pengetahuan dari mahasiswa FKIP Universitas Riau mengenai Pendidikan politik yang dibutuhkan dalam menghasilkan orientasi atau pandangan politik individu (Rinderman et.al., 2011: 2).

Pendidikan politik erat kaitannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan, karna substansi yang terdapat pada Pendidikan Kewarganegaraan memiliki luaran-luaran sikap

dan kecakapan yang dibutuhkan dan saling berhubungan dalam mencapai orientasi atau pandangan akhir politik individu (Winataputra, Udin Saripudin, 2012: 19). Adapun luaran sikap dan kecakapan yang hendak dicapai tersebut terdiri dari tiga jenis kompetensi yang masing-masing berhubungan pula dengan tiga bentuk orientasi politik, yaitu yang pertama adalah kompetensi yang mengacu kepada pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang mengacu pada kemampuan secara praktik dari warganegara atau individu yang didapatkan setelah mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan Ubaedillah & Rozak, 2012: 17). Kompetensi ini berhubungan dengan bentuk orientasi politik yaitu orientasi kognitif yang juga mengacu kepada kuantitas dari adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki individu, kewajiban, luaran dan juga peranan setiap individu atau warganegara pada politik. Orientasi kognitif ini mengacu pada pemahaman individu terhadap politik yang didasarkan oleh ilmu pengetahuan yang dimiliki; dalam hal ini yaitu kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) sebagai bekal dan Ilmu pengetahuan dasar politik (Dadut et.al., 2021: 70).

Kedua, sikap dan kompetensi mengenai jati diri kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang mengacu pada kesadaran dan komitmen dari warganegara terhadap diri pribadi dan lingkungannya Ubaedillah & Rozak, 2012: 17). Kompetensi ini berhubungan dengan bentuk orientasi politik yaitu orientasi afektif yang berkaitan dengan sikap, respon (baik berupa penolakan maupun penerimaan), keterlibatan atau yang berkaitan dengan partisipasi. Setelah memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai politik yang didapatkan dari *civic knowledge*, selanjutnya akan memengaruhi dan membentuk bagaimana perasaan atau pandangan pribadi individu terhadap politik. Respon politik yang dihasilkan berasal dari *civic dispositions* atau kesadaran dan komitmen warganegara terhadap politik (Dadut et.al., 2021: 72).

Ketiga, adalah sikap dan kompetensi terkait kemampuan, keterampilan, ataupun kecakapan yang harus dimiliki warganegara (*civic skill*) seperti dalam mewujudkan partisipasi terhadap kepentingan yang berkaitan dengan negara dan kompetensi ini tersusun dari adanya proses dan sistematis yang harus dicapai pada dua kompetensi sebelumnya. (Ubaedillah & Rozak, 2012: 17). Tanpa adanya ilmu pengetahuan kewarganegaraan yang memengaruhi pemahaman politik, tidak akan terwujud pula adanya sikap dan respon individu terhadap politik, sehingga akan memengaruhi kecakapan dan keterampilan warganegara (*civic skill*). Kompetensi ini berhubungan dengan bentuk orientasi politik yaitu orientasi evaluatif, yang berisi penilaian dan pendapat mengenai objek politik yang berasal akumulasi proses terbentuknya dua orientasi sebelumnya; orientasi

kognitif dan afektif (Dadut et.al., 2021: 73). Orientasi evaluatif menjadi putusan akhir individu dalam menghasilkan arah keputusan politik yang dipilih individu. Ketika individu memiliki kecakapan dan dapat memberikan pendapatnya mengenai pelaksanaan sebuah kebijakan politik, ataupun dalam mewujudkan partisipasinya dalam politik, menunjukkan bahwa individu memiliki kemampuan kewarganegaraan (*civic skill*) dan menunjukkan pula bahwa individu telah memiliki arah pandangan atau keputusan akhir terhadap politik.

Berdasarkan hasil dari uji korelasi *Rank Spearman* di atas, diketahui pula bahwa hubungan kuat yang berarah positif yaitu 0,612** bermakna bahwa semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mahasiswa FKIP Universitas Riau, maka semakin meningkat pula orientasi politik mahasiswa FKIP Universitas Riau. Arah positif pada hubungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan orientasi politik mahasiswa FKIP Universitas Riau ini ditandai dengan komitmen dari sikap mahasiswa FKIP Universitas Riau terhadap kebijakan politik pemerintah yang didapatkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Adanya komitmen ini didasarkan pula dengan peningkatan kualitas pemahaman mahasiswa FKIP Universitas Riau, yaitu peningkatan pemahaman individu terkait politik yang didapatkan dari Pendidikan Kewarganegaraan akan sebanding dengan kualitas pemikiran dan orientasi politik yang menjadi luarannya (Rinderman et.al., 2011: 2). Hasil analisis di atas juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Syahrul, dkk (2020) yang berjudul Orientasi Politik Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana orientasi politik mahasiswa ekstra kampus di Kota Makassar dan dipaparkan pula bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi orientasi politik mahasiswa ekstra kampus di Kota Makassar, yaitu pengetahuan politik serta pengalaman dan partisipasi politik mahasiswa akan menjadi tolak ukur dalam pembentukan perilaku politik (Syahrul et. al., 2020: 528).

SIMPULAN

Dari uji analisis korelasi yang telah peneliti lakukan untuk menjawab rumusan masalah dan dengan tujuan pada penelitian terkait hubungan Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan orientasi politik mahasiswa FKIP Universitas Riau, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan uji korelasi *Rank Spearman* didapatkan hasil nilai *P value* atau *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 atau < (kurang dari) 0,05 atau 0,01 dan nilai *Correlation Coefficient* sebesar 0,612 membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga terdapat hubungan kuat yang berarah positif antar variabel bebas (x) yaitu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan variabel terikat (y) yaitu Orientasi Politik

Mahasiswa FKIP Universitas Riau. Adapun saran dan rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel serta alat ukur dalam meneliti variabel khususnya pada orientasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Riset, T. (2016). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Untuk Perguruan Tinggi). Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Nuryanti, M. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Sugiyono. (2017). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sumario, Riyanti, A., Daulay, M. I., Bagenda, C., Soegoto, S. A., Soeikromo, D., et al. (2022). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : Hakikat, Konsep, dan Urgensi. Bandung: Widima Bhakti Persada Bandung.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2012). Pendidikan Kewarga[negara]an (*Civic Education*): PANCASILA, DEMOKRASI, HAM, DAN MASYARAKAT MADANI. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- Winataputra, Udin Saripudin. (2012). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN UNTUK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA (Gagasan , Intrumentasi, dan Praksis). Bandung: Widya Aksara Press.
- Yasin, J. (2009). Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif.
- Agus, A. A. (2015). Urgensi Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia. *Jurnal Integrasi PIPS Pascasarjana UNM*, 1(2), 248.
- Agus, A. A., Badaruddin, S., Muhkam, F. M., & Umaliah, A. D. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN POLITIK TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019-2024. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 15(2), 112-120.
- Ali, M. M. (2015). Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 176.
- A'rafiyah, N., Wulandari, T., & Dayati, U. (2019). HUBUNGAN PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN DENGAN PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 361-367.

- Astuti, N. K. (2020). Penilaian Nilai-Nilai Keadilan Sosial Dalam Konstitusi Ekonomi. *Jurnal Hukum*, 6(3), 335.
- Bunga, M. (2019). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 819.
- Dadut, K., Dari, A., & Jacob, A. (2021). Orientasi Politik Masyarakat Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai Pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Manggarai Tahun 2019. *Jurnal Program Studi Ilmu Politik*, 10(2), 65-78.
- Fajrin, O., Erlinda, S., & Hariyanti, H. (2022). Rumah Pintar Pemilu Kampar dan Peningkatan Literasi Politik Peserta Didik Tingkat SMA. *Journal of Civic Education*, 5(4), 476-483.
- Hardian, M. (2021). KONSTRUKSI ORIENTASI POLITIK SISWA SMA DI KABUPATEN SLEMAN. *Jurnal Rontal Keilmuan*, 7(1), 45-55.
- Kiftiah, M., Rahman, G., & Sarbaini. (2014, NOVEMBER). ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN PARTAI POLITIK DI KELURAHAN MELAYU KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(8), 600-607.
- Listiyoningsih, S., Dian, H., & Yuni, W. (2022). Strategi Guru Mrnghadapi Transformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2b), 655-662.
- Lutfiana, R. R., & Rizki, A. I. (2020). Urgensi Materi Bela Negara Dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Di Perguruan Tinggi. *Civic Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 4(2), 378.
- Mansyur, I. (2020). RASIONALITAS ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT NELAYAN KABUPATEN MAJENE PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF. *Tesis Tata Kelola Pemilu*, 2(1).
- Nambo, A., & Puluhuluwa, M. (2005). Memahami tentang beberapa konsep politik (suatu telaah dari sistem politik). *Jurnal Mimbar*, 21(2), 262-285.
- Nurgiansah, T. H. (2021). PETUAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTESTASI POLITIK. *AoEJ: Academy of Education Journal*, 12(1), 39-47.
- Putra, M., & Azzuhri, H. (2022). Partisipasi Politik Terhadap Isu-Isu Kontemporer (Studi Kasus Mahasiswa Kota Palembang). *AMPERA: A Research Journal On Politics And Islamic Civilization*, 3(2), 114.
- Regiani, E., & Dewi, D. A. (2021). Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 31.
- Rindermann, H., Mendoza, C. F., & Woodley, M. A. (2011). POLITICAL ORIENTATION EDUCATION AND INTELLIGENT . *ELSEVIER*, 1-9.
- Setiawan, D. (2017). Kontribusi Tingkat Pemahaman Konsepsi Wawasan Nusantara

- terhadap Sikap Nasionalisme dan Karakter Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 27.
- Syahrul, F., Paskarina, C., & Sumadinata, W. (2020). Orientasi Politik Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Pada. *Society*, 8(2), 512-531.
- Tamma, S. (2021). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PEMBENTUKAN PREFERENSI POLITIK AWAL PEMILIH PEMULA. *Jurnal Politik Profetik*, 9(1), 43-57.
- Wardhani, P. S. (2018). PARTISIPASI POLITIK PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.
- Rhosita, Adha, Hartino, Ulpa, & Rifai. (2021). PEMBELAJARAN DARING: URGENSI MENINGKATKAN CIVIC COMPETENCE MAHASISWA DITENGAH ERA SOCIETY 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Virtual Pendidikan Kewarganegaraan 2021*, (hal. 76-82). Lampung.
- Madrim, S. (2019). "Potensi Golput Generasi Muda Capai 40 Persen", <https://www.voaindonesia.com/a/potensi-golput-milenial-capai-40-persen/486708.html>, diakses pada 10 September 2022.